

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-10/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA
PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN
DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN.

Pasal 1

- (1) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (2) Penyusutan untuk harta berwujud tertentu dapat dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Pasal 2

- (1) Harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah semua harta berwujud berupa bangunan dan bukan bangunan, sepanjang harta dimaksud belum pernah digunakan atau menghasilkan dan belum menjadi beban penyusutan secara fiskal.
- (2) Tidak termasuk harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 beserta aturan pelaksanaan dan perubahannya.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar dengan status domisili/pusat (kode status pada NPWP 000).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan dilampiri:
 - a. penjelasan terperinci mengenai harta berwujud tertentu;
 - b. bukti-bukti pendukung atas saat pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tertentu dan/atau saat selesainya pengerjaan harta berwujud tertentu; dan
 - c. penjelasan mengenai saat harta berwujud tertentu mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau saat mulai menghasilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya pengeluaran atau selesainya pengerjaan harta.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Surat permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Wajib Pajak wajib memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dikirimnya surat permintaan kelengkapan (tanggal cap pos pengiriman).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada ayat (4), permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberitahukan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terlampauinya batas waktu pemenuhan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (7) Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas nama Direktur Jenderal Pajak, harus memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan tertulis dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima secara lengkap dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV atau Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa bulan saat mulai digunakannya harta berwujud tertentu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau bulan saat mulai menghasilkan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) ternyata berbeda dengan kenyataan di lapangan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan kembali saat mulainya penyusutan atas harta berwujud tertentu yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan, untuk permohonan yang disampaikan sebelum tanggal ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan belum memperoleh keputusan, penetapannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disampaikan 2 (dua) bulan setelah tanggal ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Keputusan mengenai penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 7

- (1) Terhadap harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan belum pernah diajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pajak diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Contoh penerapan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP. 196812221991031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 10 /PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA
PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN
DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya
Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat
Dilakukan pada Bulan Digunakan atau
Bulan Mulai Menghasilkan

<KOP SURAT WAJIB PAJAK>

Nomor :(1)(2)
Sifat :(3)
Lampiran :(4)
Hal : Permohonan Penetapan Saat
Mulainya Penyusutan Harta
Berwujud yang Dapat Dilakukan
pada Bulan Digunakan atau Bulan
Mulai Menghasilkan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (5)
..... (6)

Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan
Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan
Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan, yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
Jabatan : (10)

bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

Nama Wajib Pajak : (11)
NPWP : (12)
Alamat : (13)
Jenis Industri : (14)
Telepon/Fax :(15)

mengajukan permohonan penetapan saat mulainya penyusutan harta
berwujud tertentu, sebagai berikut:

No	Nama Harta Berwujud Tertentu	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Bulan Saat Mulai Digunakan	Bulan Saat Mulai Menghasilkan	Bulan Saat Mulainya Penyusutan Menurut WP
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan: *)
- ☐ penjelasan terperinci mengenai harta berwujud tertentu;
- ☐ bukti-bukti pendukung atas saat pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud tertentu dan/atau saat selesainya pengerjaan harta berwujud
tertentu;

penjelasan ...

- ☐ penjelasan mengenai saat harta berwujud tertentu mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau saat mulai menghasilkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

(24)

.....(7)

.....(10)

Keterangan:

*)Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.

Diisi oleh petugas

Diterima tanggal :(25)

Nama penerima :(26)

Tanda tangan :(27)

Lembar ke-1 : untuk KPP

Lembar ke-2 : untuk arsip pemohon

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan
(Lampiran I)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan (Surat Permohonan)
- Angka 2 : Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat
- Angka 3 : Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 7 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak
- Angka 9 : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak
- Angka 10 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak
- Angka 11 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Angka 12 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 13 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 14 : Diisi dengan jenis industri Wajib Pajak
- Angka 15 : Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak
- Angka 16 : Diisi dengan nomor urut
- Angka 17 : Diisi dengan nama harta berwujud
- Angka 18 : Diisi dengan jumlah unit harta berwujud
- Angka 19 : Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka 20 : Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu harga perolehan berdasarkan bukti-bukti pembelian, misalnya tanggal faktur pembelian atau tanggal penandatanganan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan harta berwujud.
- Angka 21 : Diisi dengan bulan dan tahun saat harta berwujud tertentu mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- Angka 22 : Diisi dengan bulan dan tahun saat mulai menghasilkan
- Angka 23 : Diisi dengan bulan saat mulainya penyusutan menurut Wajib Pajak, yaitu salah satu dari isian pada angka 21 atau angka 22
- Angka 24 : Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak
- Angka 25 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan diterima secara lengkap
- Angka 26 : Diisi dengan nama petugas penerima Surat Permohonan
- Angka 27 : Diisi dengan tanda tangan petugas penerima Surat Permohonan

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya
Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat
Dilakukan pada Bulan Digunakan atau
Bulan Mulai Menghasilkan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)

..... (3)
..... (4) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200,
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : (5)(6)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Kelengkapan
Permohonan Penetapan atas Saat
Mulainya Penyusutan Harta
Berwujud yang Dapat Dilakukan
pada Bulan Digunakan atau Bulan
Mulai Menghasilkan

Yth. (7)
..... (8)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (9) tanggal
..... (10) hal Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud
yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan, untuk proses
lebih lanjut diminta bantuan Saudara untuk melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. (11)
2. (11)

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikirimnya surat ini (tanggal cap
pos pengiriman).

Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut kelengkapan dokumen tidak
disampaikan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

(12)

..... (13)

NIP (14)

PETUNJUK PENGISIAN

Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan
Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan
Mulai Menghasilkan
(Lampiran II)

- Angka 1 : Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 2 : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 4 : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 6 : Diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat permintaan kelengkapan
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 8 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 9 : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak
- Angka 11 : Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi oleh Wajib Pajak
- Angka 12 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 13 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 14 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penetapan Saat Mulai
Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat
Dilakukan pada Bulan Digunakan atau
Bulan Mulai Menghasilkan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)

..... (3)
..... (4) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :(5) (6)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak
Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth.(7)
.....(8)

Sehubungan dengan surat Kami Nomor(9) tanggal(10) hal
Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan atas Saat Mulai
Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan,
Saudara telah diminta untuk melengkapi permohonan Saudara terkait penetapan saat mulai
penyusutan harta berwujud dengan dokumen sebagai berikut:

- 1.....(11)
- 2.....(11)

Karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, Saudara
belum memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta, dengan ini disampaikan bahwa
permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Namun apabila Saudara telah memiliki kelengkapan dokumen dimaksud, Saudara masih
dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang belum melampaui jangka waktu pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-10/PJ/2014.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(12)

.....(13)
NIP(14)

PETUNJUK PENGISIAN

Pemberitahuan Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan tidak Dapat Dipertimbangkan

(Lampiran III)

- Angka 1 : Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 2 : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi Wajib Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya
Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat
Dilakukan pada Bulan Digunakan atau
Bulan Mulai Menghasilkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)

TENTANG

PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN*) PENETAPAN SAAT MULAINYA
PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN
DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : Surat Permohonan (2) Nomor.....(3)
tanggal(4) tentang Permohonan Penetapan Saat
Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan
pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;
- Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan-
ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11
ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur
Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN*) PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN.

PERTAMA : Menyetujui/menyetujui sebagian*) permohonan dari:

Nama Wajib Pajak :(5)
NPWP :(6)
Alamat :(7)

untuk menetapkan saat mulainya penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal.....(8) dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor(9)

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP (10)

Ditetapkan di(11)
pada tanggal(12)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (13)

(14)

..... (15)

Keterangan:

*) diisi salah satu yang sesuai

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor (1) tentang
Persetujuan/Persetujuan Sebagian*) Penetapan
Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud
yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan
atau Bulan Mulai Menghasilkan

**PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN*)
PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD**

No	Nama Harta Berwujud	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Saat Mulainya Penyusutan menurut		Keterangan
					Permohonan Wajib Pajak	Keputusan Direktur Jenderal Pajak	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (10)

(11)

..... (12)

Keterangan:

*) diisi salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan/Persetujuan Sebagian Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan
(Lampiran IV)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat keputusan
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Angka 4 : Diisi dengan nomor tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal mulai berlakunya surat keputusan
- Angka 9 : Untuk penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak jika diketahui bahwa saat dimulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sebelumnya
Untuk penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang baru tidak perlu diisi
- Angka 10 : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 11 : Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal surat keputusan
- Angka 13 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 14 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 15 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat keputusan
- Angka 2 : Diisi dengan nomor urut
- Angka 3 : Diisi dengan nama harta berwujud tertentu
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah unit harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
- Angka 5 : Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
- Angka 7 : Diisi dengan saat mulai penyusutan harta berwujud tertentu menurut surat permohonan Wajib Pajak
- Angka 8 : Diisi dengan saat mulai penyusutan harta berwujud tertentu menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 9 : Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan
- Angka 10 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 11 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 12 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran V
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya
Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat
Dilakukan pada Bulan Digunakan atau
Bulan Mulai Menghasilkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)

TENTANG

PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA
BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU
BULAN MULAI MENGHASILKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : Surat Permohonan (2) Nomor.....(3)
tanggal(4) tentang Permohonan Penetapan Saat
Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan
pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;
- Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11
ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur
Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-11/PJ/2013;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan Atau Bulan Mulai Menghasilkan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN.

PERTAMA : Menolak permohonan dari:

Nama Wajib Pajak :(5)

NPWP :(6)

Alamat :(7)

untuk menetapkan saat mulainya penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini disusutkan pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP (8)

Ditetapkan di(9)

pada tanggal(10)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (11)

(12)

..... (13)

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor (1) tentang
Penolakan Penetapan Saat Mulainya
Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat
Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan
Mulai Menghasilkan

**PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA
PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD**

No	Nama Harta Berwujud	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (8)

(9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan
(Lampiran V)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat keputusan
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Angka 4 : Diisi dengan nomor tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 8 : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 9 : Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal surat keputusan
- Angka 11 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 12 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 13 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat keputusan
- Angka 2 : Diisi dengan nomor urut
- Angka 3 : Diisi dengan nama harta berwujud tertentu
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah unit harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
- Angka 5 : Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
- Angka 7 : Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan
- Angka 8 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 9 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 10 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran VI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya
Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat
Dilakukan pada Bulan Digunakan atau
Bulan Mulai Menghasilkan

CONTOH PENERAPAN

PERMOHONAN DAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

1. PT Bunga Krisan membeli mesin produksi pada bulan Januari 2015. Mesin tersebut mulai digunakan pada bulan Agustus 2015. Wajib Pajak mengajukan permohonan agar penyusutan atas mesin tersebut dimulai pada saat digunakan.
 - a. Permohonan dapat diajukan paling lambat tanggal 29 Januari 2016.
 - b. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa saat mulai digunakannya mesin sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk menetapkan saat mulainya penyusutan mesin sejak bulan Agustus 2015.
 - c. Namun demikian, apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diketahui bahwa mesin sudah mulai digunakan sejak bulan April 2015, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk menetapkan saat mulainya penyusutan mesin sejak bulan April 2015.
2. CV Mawar Melati membeli truk pada tanggal 30 Desember 2014. Truk tersebut akan digunakan mulai bulan November 2015. CV Mawar Melati mengajukan permohonan agar penyusutan atas truk tersebut dimulai pada saat digunakan. Permohonan Wajib Pajak diajukan pada tanggal 2 Februari 2015.

Permohonan Wajib Pajak ditolak karena disampaikan melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) sehingga penyusutan atas truk tersebut ditetapkan mulai sejak bulan dilakukannya pengeluaran, yaitu bulan Desember 2014.
3. PT Kembang Setaman membangun gudang yang pengerjaannya diselesaikan pada bulan September 2014. Gudang tersebut akan mulai digunakan pada bulan Juni 2015. PT Kembang Setaman mengajukan permohonan saat mulainya penyusutan gudang agar diperhitungkan sejak mulai digunakan, yaitu sejak bulan Juni 2015. Permohonan Wajib Pajak diajukan pada tanggal 31 Desember 2014.
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menyetujui permohonan Wajib Pajak telah diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2015, yaitu menetapkan bahwa saat mulainya penyusutan atas gudang tersebut terhitung sejak bulan Juni 2015.

- b. Pada tanggal 24 April 2015, diketahui bahwa sejak 19 Februari 2015, gudang Wajib Pajak ternyata telah digunakan untuk menyimpan bahan baku produksi sehingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak **menetapkan kembali** saat mulainya penyusutan atas gudang tersebut terhitung sejak bulan Februari 2015.
4. CV Sekar Harum membeli mesin pada bulan November 2013. Mesin tersebut belum dimanfaatkan dan belum disusutkan karena baru akan digunakan mulai bulan Oktober 2014. Permohonan Wajib Pajak dapat diajukan paling lambat pada tanggal 30 Januari 2015.